

## DAMPAK PERBAIKAN JALAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA KLUMPANG KEBUN, KECAMATAN HAMPARAN PERAK, KABUPATEN DELI SERDANG

Noviyanti <sup>1</sup>, Ilham Mirzaya Putra <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author: [noviyanti0103192026@uinsu.ac.id](mailto:noviyanti0103192026@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [ilhammirzaya@uinsu.ac.id](mailto:ilhammirzaya@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian dilakukan di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sekitar dan bagaimana aktivitas masyarakat dengan adanya perbaikan jalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Klumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Metode keabsahan data menggunakan validasi dan diskusi dari kepala desa dan lima masyarakat desa yang berdomisili di Desa Klumpang Kebun. Dari permasalahan yang terjadi, tampak bahwa warga masih kesulitan menjual hasil panennya karena jalan rusak dan berlubang sehingga harus berjalan kaki untuk menempuh jarak yang jauh. Ada beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diterima masyarakat adalah peningkatan ekonomi mereka melalui pembangunan dan perbaikan jalan yang mempersingkat perjalanan dan waktu, sedangkan dampak negatifnya adalah trotoar terkadang menjadi ruang komersial, balas dendam tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itulah mengapa infrastruktur jalan menjadi penting, karena infrastruktur jalan yang baik dan memadai tidak hanya menjadi arus mobilitas sosial, tetapi juga cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus melakukan pembenahan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

**Kata Kunci:** Pembangunan Infrastruktur, Transportasi, Ekonomi

### Abstract

*The research was conducted in Klumpang Kebun Village and aimed to explain how the economic conditions of the surrounding community and how the community's activities in the presence of road repairs affected the socio-economic conditions of the Klumpang Kebun village community, Silver expanse sub-district, Deli Serdang Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is in the form of observation and interviews. The data validity method uses validation and discussion from the village head and five village communities who live in Klumpang Kebun Village, Perak District, Deli Serdang Regency. From the problems that exist in Klumpang Kebun Village, Perak District, it can be seen that residents still have difficulty selling their crops because the roads are damaged and have potholes, so they have to walk and travel long distances. to sell their crops and the lack of suitable means of transportation. There are several positive and negative impacts. The positive impact received by the community is an increase in their economy through the construction and repair of roads that shorten travel and time. While the negative impact is that the sidewalk sometimes becomes a commercial space, revenge is not used properly. That is why road infrastructure is important, because good and adequate road infrastructure can not only be a stream of social mobility, but also sufficient to support regional economic growth. Therefore, the Government of Deli Serdang Regency continues to make improvements to support the community's economy.*

#### History:

Received : 13 June 2023

Revised : 20 June 2023

Accepted : 26 June 2023

Published: 28 June 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



*Keywords: Infrastructure Development, Transportation, Economy*

## **Pendahuluan**

Pembangunan adalah usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana. Menurut (Siswanto, 2022) pembangunan adalah “tumbuh dan berubah menuju modernitas yang sengaja direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, dalam rangka pembangunan bangsa.” Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan itu sendiri merupakan tanda perubahan bagi negara. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pembangunan nasional Bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut (Vitri & Herman, 2018) infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh badan publik untuk fungsi pemerintah dalam penyediaan air, listrik, pengolahan limbah, transportasi, dan jasa, serta memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur adalah sistem fisik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi. Peran pemerintah sebagai penggerak pembangunan sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat hasil pelaksanaan pembangunan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan ke depan. Proses pembangunan biasanya membawa perubahan dan juga membawa dampak positif atau negatif bagi kehidupan masyarakat. Efek positif terlihat ketika kebutuhan manusia terpenuhi berkat perkembangan ini. Selain itu, dampak negatifnya terlihat pada penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sedangkan Menurut (Rahayu et al., 2021) Pembangunan adalah suatu proses perbaikan terus-menerus dalam masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Kesejahteraan negara dapat ditentukan dengan beberapa cara, yang dilakukan melalui tindakan (pembangunan) yang disadari dan direncanakan. Pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik pada sebagian besar masyarakat. Padahal, pembangunan dimaknai secara khusus, seperti makna fisik dari kata pembangunan, misalnya pembangunan pusat perbelanjaan, jembatan, jalan raya, tempat ibadah, dan lain-lain.

Menurut (Aprilia & Susilo, 2022) pembangunan desa pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 (Permendagri, 2014) Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat desa, yang diikuti oleh perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dalam kegiatan partisipatif untuk eksploitasi dan orientasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini diharapkan pembangunan dapat didukung secara positif dan dilanjutkan dalam jangka panjang.

Menurut Kementerian Desa Republik Indonesia, pembangunan inklusif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan

oleh kepala desa dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengantar Perdamaian dan Keadilan Sosial (Kemendes, 2020). Pembangunan tidak hanya terjadi pada industri, tetapi juga perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai pembangunan karena sambungan jalan diperlukan untuk memungkinkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk kepentingan masyarakat setempat. Didaanggap jalan itu penting karena jalan yang terang dan mudah diakses memfasilitasi pergerakan orang, terutama arus pertukaran komersial dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian infrastruktur sendiri mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang publik dan merupakan pengertian dari kepentingan bersama pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

### **Definisi Infrastruktur**

Fox (2004) mendefinisikan infrastruktur sebagai "Pelayanan pekerjaan umum yang secara tradisional didukung oleh sektor publik untuk meningkatkan output sektor swasta dan memungkinkan konsumsi rumah tangga". Sedangkan (Sihombing et al., 2021) mendefinisikan tidak hanya aspek ekonomi infrastruktur tetapi juga perlindungan dan keberlanjutan negara. Selain itu, menurut (Bahri et al., 2021) menyatakan, bahwa infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, sistem air dan pembuangan limbah, bandara, pelabuhan, bangunan umum, sekolah, pusat kesehatan, penjara, fasilitas rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, TPA, dan telekomunikasi.

Mengacu pada konsep dan definisi infrastruktur di atas, penulis berkesimpulan bahwa infrastruktur secara umum mencakup ruang publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pejabat (karena kegagalan mekanisme pasar) untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang dihasilkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Infrastruktur yang dibutuhkan negara maju tentu saja berbeda dengan negara berkembang bahkan negara kurang berkembang. Hal yang sama berlaku untuk daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah industri dengan daerah pertanian dan daerah pesisir atau pulau. Infrastruktur pedesaan dapat penulis uraikan sebagai sarana dan prasarana yang dibangun oleh negara atau negara yang bekerja sama dengan swasta yang menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti jalan, jembatan, kendaraan, terminal, pelabuhan, bandara, akomodasi, pasar, perbankan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta infrastruktur, air bersih, penerangan dan sanitasi yang dapat mendukung masyarakat pedesaan dalam mencapai kehidupan yang layak, baik materiil maupun spiritual.

Perkembangan jalan raya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, serta fasilitas yang dibutuhkan bagi manusia untuk mencapai suatu tempat yang ingin dituju. Jalan raya merupakan fasilitas agar tercapainya suatu kegiatan ekonomi yang sehat dan makmur, maka dari itu pembangunan jalan harus benar-benar dapat membuat nyaman, aman,

sehat, dan cepat bagi para penggunanya. Diketahui, pemerintah memiliki instansi yang tugas dan wewenangnya adalah pemeliharaan dan pengelolaan jalan. Namun, terjadinya kerusakan jalan tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi dan distribusi masyarakat lainnya, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pengguna jalan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kerusakan jalan harus segera disingkirkan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

### **Pentingnya Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan merupakan mesin percepatan pembangunan ekonomi tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Dengan bantuan proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar yang menentukan kelancaran pergerakan barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu kawasan pasar ke kawasan pasar lainnya. Kondisi ini menurunkan harga barang dan jasa sehingga mayoritas masyarakat Indonesia yang pendapatannya masih rendah dapat membelinya. Jadi, peredaran barang, jasa, orang, uang, dan informasi, juga menentukan pergerakan harga di pasar, dengan kata lain infrastruktur jalan menetralkan harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan desa).

Ada tiga alasan utama mengapa pembangunan infrastruktur itu penting. Pertama, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja. Inilah salah satu nilai dan langkah terpenting untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang adil dan makmur. Kedua, pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur ilmu pengetahuan secara langsung mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan modal dan arus investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan cape, kawasan industri, pelabuhan, pasar, dan universitas, yang mendorong penemuan-penemuan ilmiah baru dan dapat digunakan oleh komunitas industri dan pelaku pasar. Ketiga, infrastruktur sangat mempengaruhi dan menentukan integrasi sosial ekonomi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Keempat, pembangunan infrastruktur membuka isolasi fisik dan non fisik di banyak tempat. Sebagai bagian dari kebijakan integrasi nasional kehidupan sosial dan ekonomi, tantangan pemerintah adalah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik wilayah Indonesia di awal abad ke-21. Isolasi fisik mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi daerah-daerah tersebut, karena keterpencilan daerah, sulit untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan hutan ke kota terdekat, sehingga praktis hanya dikonsumsi oleh anggota keluarga. Ini mendukung tingkat pendapatan, itulah sebabnya mereka disebut miskin.

Dalam konteks pemaparan di atas, peran pemerintah diharapkan mampu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam kebijakan infrastruktur. Beberapa di antaranya adalah pemerintah perlu meninjau kembali landasan kebijakan infrastruktur yang telah dijalankan selama ini, yang utamanya dilaksanakan dengan tindakan penduduk suatu daerah dan nilai ekonomi proyek investasi. Hal ini sangat penting karena jika indikator-indikator tersebut dijadikan acuan dasar kebijakan pembangunan infrastruktur, maka daerah yang berpenduduk sedikit akan terus tertinggal. Hal ini terjadi di wilayah Papua

pada masa Orde Baru. Implikasi politik lain dari indikator ekonomi dan demografi tersebut adalah dapat menyebabkan arus urbanisasi yang masif ke kota-kota yang memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai dan terjangkau. Kebijakan infrastruktur harus diterapkan untuk mencegah urbanisasi atau pemusatan jaringan infrastruktur di kota-kota yang menarik tingkat urbanisasi yang tinggi (Tariffan Agglomeration, 2005).

### **Manfaat Transportasi**

(Karim et al., 2023) menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat disimpulkan bahwa perkembangan transportasi telah mendorong perkembangan ekonomi, antara lain: yang pertama, syarat yang paling penting adalah jika transportasi tidak berkembang, maka tidak terjadi perkembangan ekonomi sama sekali; Kedua, bahwa tanpa transportasi yang lebih baik, sumber daya yang digunakan dalam konstruksi baru pasti akan tetap tidak terpakai atau kurang produktif. Artinya, kegiatan ekonomi yang baru tercipta tidak bersaing dengan kegiatan yang akan tercipta jika transportasi tidak diperluas.

Padahal layanan transportasi “sosial” sangat bermanfaat dengan menawarkan berbagai kemudahan, diantaranya: a) Layanan untuk individu dan kelompok; b) Pertukaran atau pengiriman data; c) Perjalanan rekreasi; d) Meningkatkan jarak sosial; e) Mengurangi jarak antara rumah dan tempat kerja; f) Membantu perluasan kota atau pembagian penduduk menjadi kelompok-kelompok kecil

Manfaat pembangunan infraskatruktur jalan khususnya di Desa Klumpang Kebun memang membawa dampak positif, diantaranya:

- a. Mempercepat waktu tempuh antar Kecamatan Hamparan Perak dengan Kota Medan.
- b. Mobilitas pendistribusian barang semakin cepat.
- c. Naiknya harga tanah di sekitar pembangunan infrastruktur jalan.

Dengan tersedianya infrastruktur transportasi jalan diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi baru, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru di kalangan masyarakat Desa Klumpang Kebun. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, listrik juga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang diperlukan manusia. Oleh sebab itu, listrik menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu infrastruktur listrik karena di kota-kota besar maupun di pedesaan listrik digunakan untuk berbagai kegiatan. Sektor kelistrikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Perannya tidak hanya sebatas sebagai sarana produksi untuk memfasilitasi pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti: industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan. Listrik mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena listrik mempunyai kaitan erat dengan produktivitas kerja. Di Indonesia prosesnya hampir sama. Umumnya, masyarakat yang terkena dampak menunjuk perwakilan ke tim yang bernegosiasi dengan pemrakarsa tentang proses kompensasi, penggunaan pekerja lokal, program CSR (Corporate Social

Responsibility), dll.

(Humayra, 2023) menyatakan, bahwa infrastruktur berperan positif dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dengan menciptakan lapangan kerja di industri konstruksi, serta mendukung pertumbuhan efisiensi dan produktivitas di sektor terkait dalam jangka menengah dan panjang. Infrastruktur tampaknya menjadi jawaban atas kebutuhan negara-negara yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, meningkatkan mobilitas barang dan jasa, serta pengurangan biaya operasional investor dalam dan luar negeri. Persoalannya, membangun infrastruktur dasar membutuhkan modal yang tidak sedikit, yang tidak selalu dibarengi dengan lompatan pengadaan nilai tambah (*value added*).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang dilaksanakan, juga berguna untuk menentukan arah pengembangan masa depan. Proses dari sebuah pembangunan biasanya akan menimbulkan perubahan dan juga memiliki dampak positif maupun negative bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif dapat terlihat saat kebutuhan manusia menjadi tercukupi karena pembangunan tersebut. Selain itu dampak negatifnya pun dapat dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan yang tidak berkelanjutan serta tidak ramah lingkungan. Pembangunan yang terjadi tidak hanya pada industri pabrik saja tetapi perbaikan dan pembuatan infrastruktur jalan juga dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan karena akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain guna kepentingan masyarakat daerah yang berada di sekitarnya. Jalan menjadi penting keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian infrastruktur sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas umum dan menjadi kepentingan bersama yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setelah perbaikan jalan ini dilaksanakan? 2). Bagaimana dampak positif dan negatif dari adanya perbaikan jalan bagi masyarakat? 3). Bagaimana dampak bagi masyarakat dalam bekerja, jalur pendidikan /bersekolah, dan lainnya?

### **Studi Kasus Perbaikan Jalan di Daerah Pedesaan**

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengungkapkan dampak positif dari perbaikan jalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Misalnya, peningkatan aksesibilitas melalui perbaikan jalan telah dikaitkan dengan peningkatan mobilitas masyarakat, akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Studi-studi ini memberikan dasar yang kuat untuk menjelaskan potensi dampak positif dari perbaikan

jalan di Desa Klumpang Kebun.

### **Peran Infrastruktur Jalan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi**

Infrastruktur jalan yang baik dianggap sebagai salah satu pendorong utama pembangunan sosial ekonomi suatu daerah. Infrastruktur jalan yang memadai dapat membuka akses ke daerah terpencil, meningkatkan efisiensi transportasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Studi tentang peran infrastruktur jalan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang manfaat perbaikan jalan di Desa Klumpang Kebun.

### **Dampak Sosial Ekonomi Perbaikan Jalan di Daerah Pedesaan**

Beberapa penelitian telah meneliti dampak perbaikan jalan di daerah pedesaan. Studi-studi tersebut menyoroti aspek-aspek seperti peningkatan pendapatan petani, aksesibilitas ke pasar, peningkatan mobilitas penduduk, dan perubahan dalam pola penggunaan lahan. Meninjau penelitian-penelitian ini dapat memberikan wawasan yang relevan dalam memahami dampak perbaikan jalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Klumpang Kebun.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Infrastruktur**

Peran serta masyarakat dalam perbaikan infrastruktur jalan juga penting untuk dipertimbangkan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Studi ini mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan deskripsi masalah yang terjadi. Mempelajari Kualitas menekankan pentingnya. Arti terungkap berkisar pada persepsi masyarakat data peristiwa diperoleh dari hasil para peneliti mencoba mempelajari mengidentifikasi, menjelaskan, meringkas berbagai kondisi terkait dampak perbaikan jalan dalam peningkatan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang merupakan serangkaian informasi yang dilakukan melalui metode tertulis. Pertanyaan dan jawaban dibuat untuk survei lisan di mana dua atau lebih karakter tatap muka langsung membahas informasi yang diperoleh dalam survei materi atau sumber (Ibrahim et al., 2023) Saat melakukan penelitian, penulis melakukan konfirmasi lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan, sehingga penulis dapat lebih fokus pada permasalahan, sedangkan penulis akhirnya melakukan konfirmasi lokasi penelitian di Wilayah Klumpang Kebun Kecamatan Hampan Perak lebih fokus Dinas Pekerja Umum. Metode dipilih sebagai model penelitian empiris, yaitu model penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan materi dengan

mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, setelah diolah informasi yang tercantum akhirnya disajikan dalam bentuk dan diuji kepatuhannya. Kajian pendapat ahli, hukum dan filsafat hukum yang dipilih oleh penulis sebagai landasan hukum.

Penelitian memakai metode ini agar dapat memberikan data secara actual dan akurat berlandaskan fakta- fakta yang diperoleh di lapangan tentang dampak perbaikan jalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sumber data yang diambil, yaitu data menggunakan dua tipe dalam pengambilannya, antara lain menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dengan pengumpulan data yang diambil saat melakukan penelitian melalui wawancara dengan informan secara langsung di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Adapun yang menjadi narasumber penelitian ini yaitu kepala desa dan lima masyarakat desa tersebut.

Kemudian, sumber data sekunder data penyokong untuk memenuhi data primer tersebut, data sekunder yang digunakan menggunakan metode keperpustakaan, yaitu melalui akumulasi data pustaka, mencatat serta mengolah bahan penelitian (zed 2004). Proses wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Metode keabsahan data menggunakan validasi dan diskusi dengan kepala desa dan lima masyarakat desa yang bertempat tinggal di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Klumpang Kebun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Hampan Perak adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia. Mayoritas penduduknya adalah Melayu (70%), Jawa (10%), Tionghoa (10%), Karo dan Batak (5%), serta beberapa suku lainnya. Silver Vasto terletak di pantai timur pulau Sumatera. Saat ini, Hampan Perak merupakan salah satu Desa di Kecamatan Hampan Perak yang tergabung dalam Prefektur Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia. Berjarak 20 kilometer dari Medan, Hampan Perak merupakan ibu kota terakhir dari Ten Dua Kuta, Kampung Perintis Guru Patimpus, kota pertama dari seribu kota di Medan. Sebagai sejarah, kami mengikuti catatan ini. Kerajaan Haru Silver Vasto adalah wilayah yang tidak bisa dikatakan maju atau bahkan terkenal di zaman modern ini. Seorang sejarawan bernama Winstedt percaya bahwa Kerajaan Haru ada dan terletak di tempat yang sekarang dikenal sebagai Tanah Deli. Sementara Groeneveldt dan sejarawan lainnya menekankan bahwa Kerajaan Aru terletak kira-kira di muara Sungai Barumon (Padang Lawas), Gilles mengatakan bahwa kerajaan itu berada di dekat Belawan. Sumber lain memperkirakan Kerajaan Haru terletak di Muara Sungai Wampu (Teluk Aru, Langkat terbagi menjadi Kabupaten Teluk Aru pada tahun 2011) dan ada yang mengklaim Sungai Panai.

Mari kita kesampingkan kontroversi itu. Jelas bahwa kita harus berasumsi bahwa

wilayah Hamparan Perak saat ini dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan. Ini bukan tanpa alasan. Sebagai referensi, penemuan beberapa peninggalan arkeologi di Kota Rintang, Kecamatan Hampara Perak dan Pecinan, Paya Pasir (Labuhan Deli) beberapa waktu lalu bisa diambil. Beberapa temuan, seperti keramik, potongan kayu bekas kapal, batu bata, dan batu nisan, konon berasal dari abad ke-12 hingga ke-16. Koordinator penggalian Kota Rintang, Nani H. Wibisono, di salah satu media di Jakarta pada 24 April 2008, mengungkapkan bahwa sebagian besar keramik tersebut berasal dari Dinasti Yuan abad ke-13 dan ke-14. Selain itu, ada tembikar dari Dinasti Ming abad ke-15, tembikar Vietnam dari abad ke-14 dan ke-16, tembikar Thailand dari abad ke-14 dan ke-16, tembikar Burma dari abad ke-14 dan ke-16, dan keramik Khmer dari abad ke-12 dan ke-14. Batu nisan yang ditemukan di tempat itu bercorak islam dengan syahadat tanpa tahun. Semua ini menunjuk pada keberadaan kawasan komersial internasional di wilayah tersebut, yang menunjukkan keberadaan sebuah kerajaan, yang kemungkinan besar adalah Kerajaan Haru. Ying Yai Sheng Lan (1416) karya Ma Huan menyatakan bahwa ada sebuah muara yang dikenal sebagai "muara air tawar" di Kerajaan Aru, yang oleh A.H. diasumsikan Seperti Sungai Gilles Deli.

Deli Serdang (دلي سردانغ); adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Lubuk Pakam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Deli Serdang tahun 2021, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 1.931.441 jiwa (2020), jumlah penduduk terbesar di antara kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Daerah tersebut memiliki banyak sumber daya alam sehingga merupakan daerah dengan peluang investasi yang cukup baik. Selain kekayaan alam yang sangat besar, Deli Serdang juga memiliki keragaman budaya yang dijiwai oleh hampir semua suku di Nusantara. Suku asli penduduk Deli Serdang adalah Suku Melayu Deli dan bagian dari suku Melayu Serdang yang namanya juga berasal dari dua kesultanan, yaitu Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Suku Karo juga merupakan penduduk asli beberapa sub-daerah di kabupaten tersebut dan rata-rata tinggal di daerah hulu/perbatasan Kabupaten Karo. Kemudian Batak Toba, Batak Simalungun dan sub Suku Batak lainnya, serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti Jawa, Minangkabau, Nias, Tionghoa, India dan lainnya juga menempati kawasan ini.

Dahulu daerah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berkedudukan di Kota Medan. Padahal, dalam sejarahnya sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan), yaitu Kesultanan Deli yang bermarkas di kota Medan dan Kesultanan Serdang yang bermarkas di Perbaungan. Bandara baru Kota Medan pengganti Bandara Polonia yaitu Bandara Kualanamu terletak di kawasan tersebut, tepatnya di kawasan Beringin. Hingga akhir tahun 2015, sistem Bus Rapid Transit Trans Medinding telah beroperasi di Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, daerah Deli Serdang sebagaimana kita ketahui memiliki dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan

(kesultanan), yaitu Kesultanan Deli berkedudukan di Kota Medan dan Kesultanan Serdang di Kota Medan, Perbaungan. Daerah administrasi Deli dan Serdang ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1984 dan Undang-Undang Keadaan Darurat No. 7 Tahun 1965. Hari jadi wilayah administratif Deli Serdang ditetapkan 1 Juli, 1946.

Berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibu kota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dan kantornya di Tanjung Garbus diresmikan pada tanggal 23 Desember 1986 oleh Gubernur Sumatera Utara. UU No. 36 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi dua daerah yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kini terdiri dari 22 kecamatan dengan 14 kabupaten dan 380 desa.

Budidaya terluas di Desa Klumpang Kebun adalah sektor perkebunan kelapa sawit dengan luas 446 hektar, dan budidaya terkecil adalah perkebunan kakao (coklat) dengan luas 1 ha. Pembagian ekonomi masyarakat desa didominasi oleh pengusaha. Potensi Desa Klumpang Kebun untuk sektor pertanian meliputi jagung, tanaman samping, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, kelapa dan ubi kayu. Potensi sektor peternakan Desa Klumpang Kebun meliputi kambing, sapi, kerbau, ayam dan itik. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pembangunan jalan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru seperti manufaktur kecil, jasa angkutan, keramba ikan, minyak eceran dan bahan bangunan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh sambungan jalan yang mudah dan terjangkau mendorong usaha ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, sambungan jalan juga mendorong penyebaran pembangunan negara dan sosial yang meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan yang diwawancara 5 orang, terdapat hasil data yang telah diolah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Wawancara Informan

<b>Pertanyaan</b>	<b>ID Informan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Identifikasi</b>
Bagaimana dampak positif dan negatif dari adanya perbaikan jalan bagi masyarakat?	KD	Dampak positif dari perbaikan jalan yaitu semakin mudahnya akses transportasi antar daerah, sehingga	Kepala Desa Klumpang Kebun, Handayanto, membenarkan kondisi jalan desanya yang telah diperbaiki Pemkab tersebut. Sekarang sudah bagus diperbaiki. Tidak hanya itu,

		<p>aktifitas bisnis tahun ini pihak berjalan dengan desa lancar. Serta mendapatkan terbukannya keuangan desa (BKD) untuk jalan sepanjang 464 meter meningkatkan dengan alokasi aktivitas sebesar Rp484 ekonomi rakyat. juta. Jalan yang Dan dampak akan dibangun negatinya sekarang ini, rusaknya sejak 2011 belum lingkungan diperbaiki sama hidup di sekitar sekali. pembangunan lumayan infrastruktur membahayakan jalan pengguna jalan kalau hujan dan malam hari. jalan, Dengan adanya berkurangnya perbaikan jalan lahan produktif alternatif menuju pertanian. arah desa ke kota itu, kepala desa berharap masyarakat bisa menikmati perjalanan yang aman dan nyaman.</p>	
<p>Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setelah perbaikan jalan ini</p>	<p>M 1</p>	<p>Manfaat pembangunan infrastruktur jalan adalah memperlancar arus distribusi</p>	<p>Dengan adanya Infrastruktur Jalan menunjukan perbaikan, sehingga</p>

dilaksanakan?		barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi kepasar dengan memberikan aksesibilitas; membuka isolasi kawasan; meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan.	memperkecil pengeluaran suatu jasa pengantaran barang yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah. Jika pengiriman sudah murah maka dapat diraih harga barang menjadi turut murah. Efisiensi Bahan Bakar. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat
Bagaimana dampak perbaikan jalan bagi masyarakat dalam bekerja, jalur pendidikan /bersekolah dan lainnya?	M 2	Yang tadinya untuk pergi bekerja saja terhalang kemacetan sekarang sudah adanya perbaikan jalan maka masyarakat desa pergi bekerja dengan aman tidak ada lagi kemacetan, sedangkan yang anak-anak untuk pergi kesekolah sering terlambat akibat terjadinya	Dengan adanya perbaikan maka meningkatlah pelayanan distribusi barang dan jasa guna meningkatkan perekonomian, serta meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

		<p>rawan kecelakaan dan kemacetan sekarang sudah tidak ada lagi kenacetan dan tidak terlambat untuk pergi ke sekolah.</p>	
Bolehkah dana desa untuk membangun jalan kabupaten?	M3	<p>Tupoksi hanya jalan desa, Kalau jalan berstatus jalan kabupaten ataupun provinsi, itu tugas daerah. Kalau ingin jalan kabupaten dibangun, ajukan ke kabupaten, jangan gunakan dana desa. Dan ingat, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa</p>	<p>Kalau ingin jalan kabupaten dibangun, ajukan ke kabupaten, jangan gunakan dana desa. Dan ingat, dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa.</p>
Apakah tujuan Pemerintah Dengan memberikan dana kepada desa melalui program Dana desa?	M 4	<p>Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan</p>	<p>Tujuan pemerintah memberikan dana desa karena ingin Menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan. Membangun infrastruktur</p>

		kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.	desa sesuai dengan kearifan lokal. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dengan tujuan kesejahteraan sosial. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Bagaimana hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi di daerah pedesaan?	M 5	Memperkuat sektor pertanian dan perdagangan, mengembangkan sektor industri kecil dan menengah, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah. Mengembangkan usaha kreatif pada usaha kecil dan menengah. Meningkatkan dan menjaga infrastruktur yang menunjang perekonomian. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kebanyakan dari masyarakat pedesaan

memanfaatkan  
kekayaan alam  
sekitar untuk  
mencari nafkah.  
Beberapa di  
antaranya adalah  
dengan bertani  
dan berkebun.

Menurut Todaro 2000, menemukan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Proses pembangunan meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini, infrastruktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, dan ruang publik dapat dikatakan sebagai pilar dalam banyak hal. Oleh karena itu infrastruktur jalan menjadi penting, karena infrastruktur jalan yang baik dan memadai tidak hanya dapat menjadi arus mobilitas sosial, tetapi juga cukup menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus melakukan pembenahan untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pembangunan perbaikan jalan sangat mengutamakan kualitas, seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Hasil pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan cukup baik karena kualitasnya memenuhi standar. Pembangunan jalan desa merevitalisasi fungsi lalu lintas jalan desa yang digolongkan sebagai jalan tugas perkotaan di pedesaan. Pentingnya misi lokal suatu kawasan pedesaan adalah sebagai penghubung antar desa atau pasar, pendidikan dan ruang publik lainnya, sebagai penghubung antar pemukiman dan sebagai penghubung antara wilayah desa dengan wilayah lainnya.

Menurut (NSS, Suryawardana dan Triyani, 2015), infrastruktur secara umum meliputi ruang publik yang disiapkan oleh pemerintah sebagai pelayanan publik untuk mendukung dan memajukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti jalan, jembatan, terminal, pasar, serta pendidikan dan infrastruktur kesehatan yang dapat menunjang tercapainya kehidupan masyarakat pedesaan yang bermartabat baik secara materil maupun spiritual. Perbaikan jalan di Desa Klumpang Kebun merupakan kunci keberhasilan program pembangunan berbasis masyarakat mengingat aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Menggunakan tenaga kerja lokal
- b. Bahan baku lokal diutamakan
- c. Bangun infrastruktur sederhana untuk memungkinkan masyarakat lokal melakukan ini tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar.

Pembangunan pada dasarnya memiliki dampak yang menyertainya. Dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Klumpang Kebun memiliki dampak positif dan

negatif, yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Karena adanya perbaikan jalan, membantu masyarakat untuk berbelanja dan menjual hasil panen mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2) Aktivitas manusia dari satu daerah ke daerah lain dapat berjalan dengan lebih cepat karena manusia menginginkan waktu yang efektif dan efisien.
- 3) Memicu pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.
- 4) Pelebaran dan pembukaan jalan baru yang berfungsi menjadi jalur-jalur alternatif, baik di Medan, Binjai, Tanjung Morawa, Belawan.
- 5) Membuka lapangan pekerjaan baru bagi pedagang kaki lima untuk berdagang di sepanjang jalan, khususnya di tempat wisata.
- 6) Jalan menjadi lebih mudah untuk dilalui para turis dan tamu menuju tempat wisata alam.

b. Dampak Negatif

- 1) Trotoar terkadang beralih fungsi menjadi tempat untuk berdagang.
- 2) Retribusi yang diperoleh dari daerah tujuan wisata kurang dipergunakan dengan baik.
- 3) Pemeliharaan jalan dari Klumpang Kebun-Belawan tidak diperhatikan secara periodik, padahal jumlah retribusi terus ditingkatkan.
- 4) Terjadi kemacetan dan genangan air yang disebabkan oleh hujan lebat

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dampak perbaikan jalan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diterima masyarakat, yaitu meningkatkan perekonomiannya melalui pembangunan dan perbaikan jalan yang mempersingkat perjalanan dan waktu. Pada saat yang sama, memiliki efek negatif bahwa trotoar terkadang berubah fungsi menjadi tempat komersial, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang sangat diharapkan untuk hal tersebut. Beberapa di antaranya, yakni pemerintah, perlu meninjau kembali landasan kebijakan infrastruktur yang diterapkan selama ini, yang utamanya dilakukan dengan mengukur jumlah penduduk suatu wilayah dan nilai finansial proyek investasi. Dampak negatif pembangunan dapat diminimalkan dengan memperhatikan ekonomi masyarakat miskin, menciptakan tempat usaha yang layak di sepanjang jalan, tetapi juga tanpa mengganggu pengguna jalan.

### **Daftar Pustaka**

Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya*

- Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197–211.
- Bahri, I., Pangastuti, Y., Ibrahim, M. I. T., & Mahyuddin, M. (2021). Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Wilayah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)*, 4(1), 287–303.
- Drajat Kartono and hanif Nurcholis. 2016, Konsep dan Teori Pembangunan, Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, IPEM4542/M, pp. 1–52
- Humayra, U. (2023). *Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2017-2021*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). *METODE PENELITIAN BERBAGAI BIDANG KEILMUAN (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M. E., Suparman, A., SI, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kessa, W. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kemendes. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2020.
- NSS, R. L. P., Suryawardana, E. and Triyani, D. 2015. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat DiKota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), p. 82. doi: 10.26623 /jdsb.V 17i1.505.
- Rahayu, S., Mahdiani, N. E., Rohani, A., & Hsb, D. R. (2021). Peranan Partai Persatuan Pembangunan dalam Membangun Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8055–8059.
- Sihombing, E. N. A. M., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1–10.
- Siswanto, I. J. (2022). *MEKANISME ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN DI KABUPATEN SUMENEP*. Universitas Wiraraja Madura.
- Vitri, G., & Herman, H. (2018). PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Padang*, 5(2), 96–105.